

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Role of Commission III of the Jambi Provincial DPRD in the Rejection of the Construction of PT Sinar Anugrah Sukses (SAS) Stockpiles in Aur Kenali Village, Telanaipura District, Jambi Province. Every mining activity of a large company must have negative and positive impacts, and this is related to the environment. The impact of the construction of PT Sinar Anugrah Sukses's stockpiles has an impact that affects the Aur Kenali community around the construction area, such as environmental damage, air pollution, road damage, contaminated rivers, and many more. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that Commission III has carried out a supervisory and advocacy role in responding to this conflict, including through field visits and hearing forums. In the policy-making process, there are stages that must be carried out beforehand, namely the agenda preparation stage, the policy adoption stage, and the policy formulation stage. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the legislature through a quick response, public transparency, strict enforcement of sanctions, and community participation in the supervision process, such as conducting observations and viewing the AMDAL Permit period of PT SAS which has passed the environmental and community aspects.

Keywords: coal stockpille, public policy, environment.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi terhadap Penolakan Pembangunan Stockpille PT Sinar Anugrah Sukses (SAS) di Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Provinsi Jambi. Setiap kegiatan pertambangan perusahaan besar pasti memiliki dampak negatif maupun positif, dan hal itu berhubungan dengan lingkungan. Dampak pada pembangunan *stockpille* PT Sinar Anugrah Sukses memiliki dampak yang berpengaruh pada masyarakat Aur Kenali disekitar area pembangunan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, kerusakan jalan, sungai yang terkontaminasi, dan banyak lagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi III telah menjalankan peran pengawasan dan advokasi dalam merespons konflik ini, termasuk melalui kunjungan lapangan dan forum dengar pendapat. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh lambannya proses PT SAS terhadap realisasi suatu perumusan kebijakan, yaitu pembuatan jalan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran legislatif melalui respons cepat, transparansi publik, penegakan sanksi tegas, dan partisipasi Masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melakukan observasi dan melihat masa Izin AMDAL PT SAS yang telah lulus terhadap aspek lingkungan dan Masyarakat.

Kata Kunci: *stockpille* batubara, kebijakan publik, lingkungan.